



PEMERINTAH KOTA MALANG

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021



**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2021 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan analisis capaian kinerja kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu Laporan ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel.

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut, melalui pendekatan koordinasi serta asistensi dari berbagai narasumber yang kompeten. Mudah-mudahan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur pada tahun-tahun berikutnya.

Malang, Februari 2022

**Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



SITI MAHMUDAH, SE., MM.
Pembina Tingkat I
NIP.19690324 199603 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Isu-Isu Strategis	6
BAB II. PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. Perencanaan Kinerja	9
B. Indikator Kinerja Utama	12
C. Perjanjian Kinerja	12
D. Standar Penilaian	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran	37
BAB IV. PENUTUP	41
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Hasil Penilaian Capaian Sasaran Dinas Tenaga Kerja , Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020	vi
Tabel 2	Ikhtisar Capaian Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja , Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020	vi
Tabel 2.1.	Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2018-2023	10
Tabel 2.2.	Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2018-2023	12
Tabel 3.1.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	16
Tabel 3.2.	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023	18
Tabel 3.3.	Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra	20
Tabel 3.4.	Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya	21
Tabel 3.5.	Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)	23
Tabel 3.6.	Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021	25
Tabel 3.7.	Analisa Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Program/Kegiatan	27
Tabel 3.8.	Realisasi Anggaran Tahun 2021	37

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023
- Lampiran 2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- Lampiran 3. Pengukuran Kinerja Tahun 2021

RINGKASAN EKSEKUTIF

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan, maka disusunlah Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang berfungsi sebagai media dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2021 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang tenaga kerja, penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan. Keberhasilan di dalam memberikan pelayanan ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan dan dukungan serta partisipasi masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, Laporan kinerja ini juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat mengintegrasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Berdasarkan hasil pengukuran atas rencana kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang tahun 2021 menunjukkan bahwa capaian kinerja dari 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja yang telah ditetapkan secara umum tercapai dengan sangat berhasil dengan rata-rata capaian sebesar 632,80%. Adapun pencapaian sasaran ini didukung oleh kebijakan yang terangkum dalam 9 program, 17 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Adapun hasil pengukuran dapat dijelaskan berikut ini :

Tabel 1
Hasil Penilaian Capaian Sasaran Dinas Tenaga Kerja,
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2021

Rentang Capaian (%)	Pencapaian	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil	1	1
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil	3	4
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil	1	1
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil	0	0

Secara umum kategori sangat berhasil, tercapai/berhasil atau cukup tercapai ini disumbangkan oleh kinerja atas program, kegiatan dan sub kegiatan urusan Ketenagakerjaan, Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Namun demikian, keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari hambatan-hambatan atau permasalahan-permasalahan yang dijumpai baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas permasalahan yang terjadi, sehingga diketahui penyebab munculnya permasalahan atau hambatan dalam pencapaian kinerja.

Adapun kinerja pencapaian sasaran di bidang ketenagakerjaan , penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2
Ikhtisar Capaian Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja,
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KETERANGAN
Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	67	43,58	65,05%	
	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	3,8 %	126,12%	3319,05%	

Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja	93,80%	90,35%	96,32%	
Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik	3,5	3,67	104,86%	
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	88,8	95,94	108,04%	
Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	81,76	84,60	103,47%	

Dari Tabel 2 di atas terlihat bahwa Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang cukup tercapai dan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran, perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan yang digunakan dalam pencapaian kinerja, dimana dalam hal ini tertuang dalam program, kegiatan dan sub kegiatan bidang ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Perizinan. Oleh karena itu, pada perencanaan strategisnya Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang pada tahun 2021 merencanakan sebanyak 9 program, 17 kegiatan dan 33 sub kegiatan yang telah terealisasi sebanyak 8 program, 15 kegiatan dan 31 sub kegiatan.

Seluruh capaian kinerja utama tersebut di atas tentu dihasilkan dengan dukungan Sumber Daya Manusia dan Anggaran. Dalam tahun 2021, telah dipergunakan anggaran dan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

1. Realisasi penggunaan dana adalah senilai Rp.15.840.052.163 dari anggaran sebesar Rp.21.007.612.000 atau mencapai 75,40 %
2. Realisasi pemanfaatan sumber daya manusia adalah sebesar 66 orang per bulan Desember 2021.

Pelaporan akuntabilitas kinerja ini selain menjadi media evaluasi, juga menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang

berkesinambungan. Oleh karena itu, hal terpenting dari laporan ini adalah menggali pelajaran untuk membenahan kedepan. Menyadari hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang telah mempersiapkan strategi-strategi pembenahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan dapat diminimalisir.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Laporan Kinerja dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan, maka diperlukan pengukuran kinerja dan evaluasi yang disajikan melalui keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “*good governance*”. Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021 ini adalah untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Walikota.

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, maka Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan di dalam program kegiatan Tahun Anggaran 2021 serta pengelolaan sumber daya yang dipercayakan. Pertanggungjawaban dimaksud dilakukan melalui pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan media pertanggungjawaban secara periodik dan melembaga sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1. *Dasar Hukum*

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. Peraturan Daerah Kota Malang 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - e. Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
 - f. Peraturan Walikota Malang Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - g. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - h. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2. Maksud dan tujuan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang tahun 2021.

Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2021 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan dan seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

3. Kelembagaan

a. Pembentukan Organisasi

Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Malang 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

b. Kedudukan Organisasi

Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

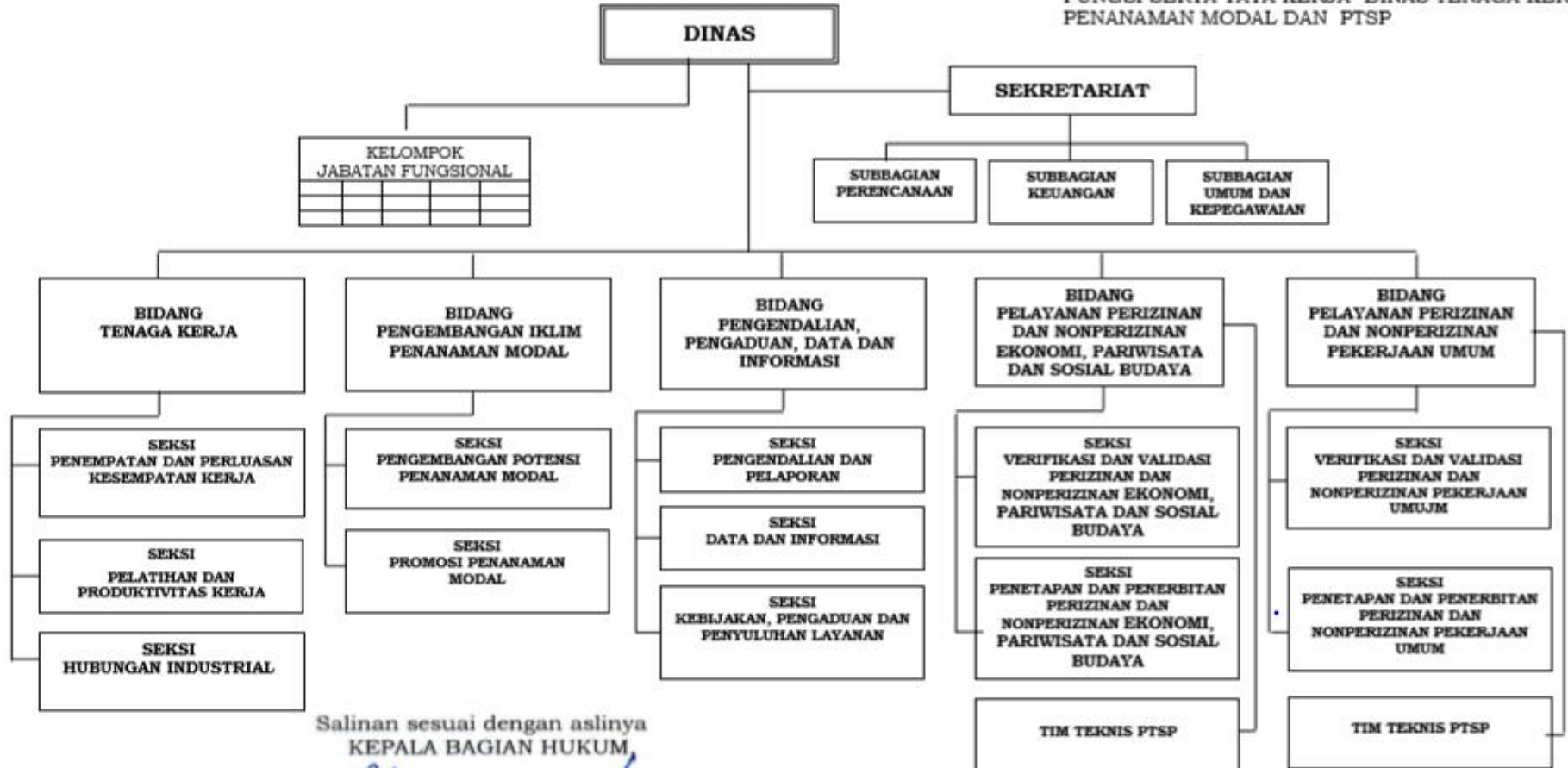
c. Struktur Organisasi

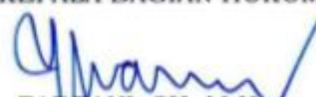
Dasar pembentukan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 67 TAHUN 2019
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA,
 PENANAMAN MODAL DAN PTSP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PTSP



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 TABRANI, S.H., M.Hum.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,
 ttd.
 SUTIAJI

d. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah, serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - c. pelaksanaan pelatihan ketenagakerjaan;
 - d. pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
 - e. pembinaan bidang ketenagakerjaan, penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - f. pemberian konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;
 - g. pengukuran produktivitas tenaga kerja;
 - h. pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan serta perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja;
 - i. koordinasi perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri pra dan purna penempatan;
 - j. koordinasi pengawasan tenaga kerja asing;
 - k. pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam Daerah;
 - l. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di Daerah;

- m. penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal;
- n. penyusunan peta potensi investasi;
- o. penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- p. fasilitasi kemitraan pelaku usaha kecil, menengah, dan besar;
- q. pengendalian pelaksanaan tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan;
- r. pengelolaan data dan informasi tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan yang terintegrasi;
- s. pencabutan izin atas pelanggaran terhadap perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan;
- t. pengembangan sistem informasi dan pengolahan data tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan;
- u. pelaksanaan penanganan pengaduan dan informasi tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan;
- v. pengawasan dan/atau penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang tenaga kerja, penanaman modal dan perizinan;
- w. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- x. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- y. pelaksanaan administrasi di bidang tenaga kerja dan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- z. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang tenaga kerja dan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

B. ISU-ISU STRATEGIS

Isu Strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang tidak terlepas dari permasalahan yang selama ini muncul. Beberapa isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka pengangguran, yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal sebagai akibat terdampaknya Covid-19 sehingga banyak pekerja yang ter-PHK;
2. Rendahnya kualitas dan kompetensi SDM pencari kerja;
3. Kurang relevansinya program pelatihan kerja dengan kebutuhan industri sehingga terjadi ketimpangan antara kebutuhan industri/perusahaan dengan kompetensi angkatan kerja;
4. Belum optimalnya kondisi ketenagakerjaan, ditandai oleh hubungan industrial yang masih rentan akibat kurang harmonisnya hubungan antara pengusaha dan pekerja;
5. Terbatasnya perlindungan tenaga kerja yang ditandai dengan masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan.
6. Kemudahan dalam pengurusan perizinan baik izin usaha dan penanaman modal. Selaras dengan program pemerintah untuk meningkatkan kemudahan investasi melalui berbagai kebijakan perizinan berusaha, dimana kemudahan berusaha berpengaruh terhadap minat pelaku usaha untuk melakukan investasi di Kota Malang.
7. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :
 - a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dilaksanakan pada Disnaker, PMPTSP dengan ditambahkannya kewenangan pelayanan perizinan dan Non perizinan dari 56 Izin menjadi 129 perizinan dan Non Perizinan;
 - b. Komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota Malang untuk melaksanakan Perizinan Berusaha melalui Online Single Submission sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berbasis resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
 - c. Mal Pelayanan Publik sebagai sarana pelayanan publik merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman,

dan nyaman.

8. Iklim Investasi

Kota Malang sebagai Kota yang berkembang secara pesat memiliki potensi investasi yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan dan mempunyai nilai jual yang strategis untuk meningkatkan sektor perekonomian berbasis ekonomi kreatif dan pemulihan perekonomian Kota Malang sebagai dampak pandemi Covid-19 ini melalui :

- a. Optimalisasi pemetaan potensi investasi;
- b. Optimalisasi promosi dan kerjasama kemitraan di bidang investasi;
- c. Optimalisasi layanan perizinan dan non perizinan;
- d. Optimalisasi data perizinan, non perizinan penanaman modal.

9. Kualitas Pelayanan Publik.

Disnaker,PMPTSP berusaha mewujudkan kualitas pelayanan yang berfokus pada masyarakat, yang diimplementasikan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta Sistem Layanan yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Penyelenggaraan Pemerintahan perlu diadakan suatu rumusan perencanaan kinerja baik perencanaan strategis maupun rencana kerja tahunan yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis dan rencana kerja instansi pemerintah, yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan kegiatan, program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang akan dicapai dalam kurun waktu 2018-2023.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang pada akhir periode renstra adalah “Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel.”

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perlu ditentukan sasaran yang akan dicapai. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam urusan yang spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang pendek. Di dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, terdapat sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang kompeten dan Nilai Penanaman Modal
2. Meningkatnya Penempatan Kerja dan hubungan industrial yang kondusif.
3. Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
5. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.1
Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra
Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perijinan dan non perijinan yang akuntabel		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		65,94					72	
			Predikat WBK							75	
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal		Rasio daya serap tenaga kerja	38,73	63,91	63,91	65	67	70	73	73
			Persentase peningkatan nilai investasi daerah			3,6 %	3,7 %	3,8 %	3,9 %	4,0 %	4,0 %
	Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif		Rasio penduduk yang bekerja		93,21 %	93,21 %	93,50 %	93,80 %	94,10 %	94,40 %	94,40 %
			Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik			2,5	3	3,5	3,8	4,5	4,5
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perijinan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan		87	85	88,5	88,8	89	89	89
Nilai SAKIP			79,66	81,65	81,65	81,75	81,76	81,80	81,85	81,85	

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal.

Adapun strategi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pelaksanaan Pelatihan Kerja yang mempunyai daya saing untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja;
- b. Meningkatkan perluasan Kesempatan Kerja dan kualitas perlindungan sosial bagi pekerja;
- c. Meningkatkan kualitas layanan perizinan IMB;
- d. Memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- e. Menyusun aplikasi layanan yang berbasis elektronik dan berintegrasi dengan OPD lainnya.

Adapun arah kebijakan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Meningkatkan Jumlah Penempatan Tenaga Kerja dan hubungan industrial yang harmonis
- c. Menyusun Standar Pelayanan dan SOP pelayanan ketenagakerjaan, penanaman modal serta perizinan dan non perizinan dengan melibatkan pengguna layanan dan stakeholder terkait.
- d. Menindaklanjuti layanan pemenuhan komitmen bagi pelaku usaha yang telah memiliki NIB serta dan masukan dari masyarakat.
- e. Pengembangan Aplikasi Layanan Disnaker, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berbasis elektronik
- f. Menyusun rekomendasi kebijakan insentif termasuk kriteria, prosedur, kewajiban dan monitoring.
- g. Melakukan sosialisasi pemanfaatan kemitraan kepada dunia usaha.
- h. Pengembangan strategi promosi investasi Kota Malang yang lebih efisien dan efektif

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/234/35.73.122/2019 tentang Penetapan Indikator Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023.

Adapun IKU Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.

Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2018-2023

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perijinan dan non perijinan yang akuntabel	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja					72
		Predikat WBK					75
1.1	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	63,91	65	67	70	73
		Persentase peningkatan nilai investasi daerah	3,6 %	3,7 %	3,8 %	3,9 %	4,0 %
1.2	Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja	93,21%	93,50%	93,80%	94,10%	94,40%
1.3	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik	2,5	3	3,5	3,8	4,5
1.4	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	85	88,5	88,8	89	89
1.5	Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	81,65	81,75	81,76	81,80	81,85

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan

tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2021 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2021 secara rinci adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel.

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	67	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.	700.000.000
	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	3,8 %	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	134.695.500
2. Program Promosi Penanaman Modal			0	
Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja	93,8%	1. Program Penempatan Tenaga Kerja	32.099.900
			2. Program Hubungan Industrial	350.775.000
Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik	3,5	1. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	179.469.724
			2. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal	468.312.900

Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	88,8	1. Program Pelayanan Penanaman Modal	936.365.952
Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	81,76	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18.205.893.024

D. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja yang diuraikan pada bab ini menyajikan penjelasan tentang pencapaian sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Pengukuran capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Kota Malang dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya, sehingga diketahui selisih kinerjanya (performance gap). Berdasarkan performance gap tersebut, dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Dalam proses pengukuran kinerja tersebut, diperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan biaya, manfaat, efisiensi dan efektivitas.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

- Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang Kompeten dan Nilai Penanaman Modal
- Meningkatnya Penempatan Kerja dan Hubungan Industrial yang kondusif
- Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2021 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi dari sasaran yang telah diperjanjikan kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KETERANGAN
Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	67	43,58	65,05%	
	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	3,8 %	126,12%	3319,05%	
Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja	93,80%	90,35%	96,32%	
Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik	3,5	3,67	104,86%	
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	88,8	95,94	108,04%	
Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	81,76	84,60	103,47%	
Rata-rata keberhasilan				632,80%	

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai **rata-rata keberhasilan sebesar 632,80%** pada tahun 2021 mengalami kenaikan tinggi sekali dari tahun sebelumnya.

Pada sasaran " Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal", diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

1. Target rasio daya serap tenaga kerja sebesar 67, realisasi sebesar 43,58, capaian 65,05% dengan kategori "cukup berhasil". Formulasi perhitungan adalah *Jumlah pekerja/buruh pada perusahaan swasta/PMDN/PMA dibagi jumlah perusahaan swasta/PMDN/PMA dikali 100%*. Adapun jumlah pekerja/buruh tahun 2021 sebesar 64.851

orang, sedangkan jumlah perusahaan swasta/PMDN/PMA tahun 2021 sebesar 1488 perusahaan.

2. Target persentase peningkatan nilai investasi daerah sebesar 3,8%, realisasi peningkatan nilai investasi 126,12% sehingga capaian 3319,05% dengan kategori “sangat berhasil“. Formulasi perhitungan adalah *Jumlah nilai investasi tahun berjalan dikurangi Jumlah nilai investasi tahun sebelumnya dibagi Jumlah nilai investasi tahun sebelumnya dikali 100%*. Adapun jumlah nilai investasi tahun 2021 sebesar 667.820.200.000 sedangkan nilai investasi tahun 2020 sebesar 295.333.937.416.

Pada sasaran "Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif", dengan indikator kinerja Rasio penduduk yang bekerja ditetapkan target sebesar 93,80%, realisasi sebesar 90,35%, capaian 96,32% dengan kategori “berhasil”. Formulasi perhitungan adalah *Jumlah penduduk yang bekerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%*. Adapun jumlah penduduk yang bekerja adalah 435.630, sedangkan jumlah angkatan kerja adalah 482.172.

Sedangkan Pada sasaran "Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik", dengan indikator kinerja Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik ditetapkan target sebesar 3,5 realisasi sebesar 3,67 capaian 104,86% dengan kategori “berhasil”.

Kemudian pada sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan", dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan ditetapkan target sebesar 88,8 realisasi sebesar 95,94 capaian 108,04% dengan kategori “berhasil”.

Selanjutnya pada sasaran "Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah", dengan indikator kinerja Nilai SAKIP ditetapkan target sebesar 81,76 realisasi sebesar 84,60 capaian 103,47% dengan kategori “berhasil”.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023.

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, rasio, dan nilai. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, secara umum dihitung dengan rumus

bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran.

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2018-2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI 2018	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	-	-	64,36	43,58			-	99,01%	65,05%		
	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	-	11,53%	0,00%	126,12%			320%	0,00%	3319,05%		
Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja	-	-	90,39%	90,35%				96,67%	96,32%		
Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik	-	26,7	26,7	3,67			103%	89%	104,86%		
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	-	88	85,09	95,94			103%	96,14%	108,04%		
Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	-	-	82,76	84,60				101,23%	103,47%		

Pengukuran kinerja dari tahun 2018 – 2023 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

a. Sasaran strategis : Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal.

1) **Indikator kinerja 1** : Rasio daya serap tenaga kerja. Realisasi tahun 2020 sebesar 64,36 dengan capaian 99,01%, sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan daya serap tenaga kerja sebesar 43,58 dengan capaian 65,05%, hal ini sangat berpengaruh sekali terhadap kinerja sasaran kualitas tenaga kerja yang kompeten.

2) **Indikator kinerja 2** : Persentase peningkatan nilai investasi daerah. Realisasi tahun 2019 sebesar 11,53% dengan capaian 320%, realisasi tahun 2020 sebesar 0,0% dengan capaian 0,00%, sedangkan tahun 2021 realisasi investasi sebesar 126,12% dengan capaian 3319,05% sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya (tahun 2020) yang cukup tinggi meskipun nilai investasinya tidak lebih besar dibanding tahun 2019.

b. Sasaran strategis : Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif.

Indikator kinerja 3 : Rasio penduduk yang bekerja. Realisasi tahun 2021 sebesar 90,35%, untuk tahun 2020 sebesar 90,39%, sedangkan tahun 2019 belum ditetapkan indikator tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator tersebut masih belum ada peningkatan karena dari tahun 2021 dan 2020 terjadi sedikit penurunan realisasi.

c. Sasaran strategis : Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Indikator kinerja 4 : Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik. Realisasi tahun 2021 sebesar 3,67 dengan capaian 104,86% sedangkan tahun 2020 sebesar 2,67 dengan capaian 89% dan pada tahun 2019 sebesar 2,67 dengan capaian sebesar 103% sehingga dapat

disimpulkan bahwa pada tahun 2020 mengalami penurunan dari capaian tahun 2019 dan terjadi kenaikan lagi di tahun 2021.

- d. Sasaran strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Indikator kinerja 5 : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan. Realisasi tahun 2020 sebesar 85,09 dengan capaian sebesar 96,14%, realisasi tahun 2021 sebesar 95,94 dengan capaian sebesar 108,04%, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan realisasi kinerja.

- e. Sasaran strategis : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja 6 : Nilai SAKIP pada tahun 2020 terealisasi sebesar 82,76 dengan capaian 101,23% dan Tahun 2021 terealisasi sebesar 84,60 dengan capaian 103,47%, sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator tersebut mengalami kenaikan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja yang mengacu pada
Target Jangka Menengah Renstra

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	2	3	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	73	-	64,36	43,58		
		Persentase peningkatan nilai investasi daerah	4,0%	11,53%	0%	126,12%		
2.	Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja	94,40%	-	90,39%	90,35%		

Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang

3.	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik	4,5	2,67	2,67	3,67		
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	89	88	85,09	95,94		
5.	Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	81,85	-	82,76	84,60		

4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya

Tabel 3.4
Realisasi kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/ Standar Nasional lainnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Standar Nasional	
			2019	Target	Realisasi
				2019	2019
1	2	2	4	5	6
	NIHIL				

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, urusan ketenagakerjaan dan penanaman modal menjadi urusan wajib non dasar sehingga Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM).

5. Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan.

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2021 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

a. Sasaran strategis 1 :

Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal, rata-rata capaian indikator sebesar 1692,05% sehingga tercapai secara maksimal dan merupakan kategori sangat berhasil. Namun demikian untuk kualitas tenaga kerja yang

kompeten kurang menunjang keberhasilan sasaran ini karena kondisi pandemi *Covid 19* sangat berpengaruh terhadap banyaknya tenaga kerja yang terdampak yang mengakibatkan tingkat pengangguran yang cukup tinggi serta terbatasnya kegiatan Pendidikan dan pelatihan Peningkatan keterampilan/produktivitas dan pemagangan berbasis pengguna di perusahaan. Sedangkan untuk persentase peningkatan nilai investasi mengalami peningkatan yang cukup tinggi artinya perekonomian di Kota Malang mulai bangkit kembali meskipun masa pandemi *covid-19* belum berakhir.

- 1) Indikator 1 : Rasio daya serap tenaga kerja. Telah tercapai sebesar 65,05% dari target sebesar 67.
- 2) Indikator 2 : Persentase peningkatan nilai investasi daerah tercapai dari target 3,8% karena nilai investasi mencapai 667.820.200.000 (sumber data LKPM) sehingga mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

b. Sasaran strategis 2 :

Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif, rata-rata capaian indikator sebesar 96,32% telah tercapai sesuai yang diperjanjikan karena terlaksananya pembinaan stakeholder ketenagakerjaan secara optimal dan penempatan kerja bagi pencari kerja terdaftar melalui beberapa program kegiatan diantaranya Koordinasi pengusaha dan pekerja melalui rapat LKS Tripartit, Pembahasan UMK, Fasilitasi pekerja terdampak *covid 19* untuk mendapatkan upgrade skill maupun bantuan tunai serta Fasilitasi/mediasi kasus perselisihan hubungan industrial.

- 1) Indikator 1 : Rasio Penduduk yang bekerja telah tercapai sebesar 96,32% dari target sebesar 93,80%.

c. Sasaran strategis 3 :

Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, rata-rata capaian indikator sebesar 104,86% sudah tercapai secara maksimal sesuai yang diperjanjikan karena untuk realisasi indeks layanan SPBE pada aspek pelayanan publik Kota Malang merupakan hasil evaluasi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) secara keseluruhan. Indikator kinerja ini

didukung oleh terlaksananya program kegiatan pengendalian, data dan informasi.

- 1) Indikator 1 : Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik tercapai 104,86% melebihi dari target sebesar 3,5.

d. Sasaran strategis 4 :

Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, rata-rata capaian indikator sebesar 108% telah tercapai sesuai yang diperjanjikan. Indikator kinerja ini didukung oleh terlaksananya program kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan ekonomi, pariwisata, sosial budaya dan pekerjaan umum.

- 1) Indikator 1 : Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan tercapai 108,04% melebihi dari target sebesar 88,8.

e. Sasaran strategis 5 :

Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, rata-rata capaian indikator sebesar 103,47% telah tercapai secara maksimal sesuai yang diperjanjikan Indikator kinerja ini didukung oleh terlaksananya program kegiatan pelayanan kesekretariatan.

- 1) Indikator 1 : Nilai SAKIP tercapai 103,47% melebihi target yang ditetapkan sebesar 81,76.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.5
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	67	43,58	65,05	700.000.000	503.145.900	71,88	90,50
	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	3,8%	126,12%	3319,05	134.695.500	133.695.500	99,26	3344,87
Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja	93,80%	90,35%	96,32	382.874.900	373.326.000	97,51	98,79
Terwujudnya Sistem Pemerintahan	Indeks Layanan SPBE pada aspek	3,5	3,67	104,86	647.782.624	433.262.104	66,88	156,77

Berbasis Elektronik	elayanan publik							
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	88,8	95,9	108,04	936.365.952	923.292.476	98,60	109,57
Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	81,76	84,60	103,47	18.205.893.024	13.473.330.183	74,01	139,84

Catatan : > 100%, maka penggunaan dana efektif

< 100%, maka penggunaan dana belum efektif

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa masih ada beberapa penggunaan anggaran yang tidak efisien dan efektif yang berdasarkan kinerja.

- 1) Indikator Rasio daya serap tenaga kerja dengan capaian kinerja 65,05% dan capaian anggaran 71,88%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 28,12% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 90,50%
- 2) Indikator Persentase peningkatan nilai investasi daerah dengan capaian kinerja 3319,05% dan capaian anggaran 99,26%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 0,74% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 3343,87%.
- 3) Indikator Rasio Penduduk yang bekerja capaian kinerja 96,32% dan capaian anggaran 97,51%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 2,49% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 98,79%.
- 4) Indikator Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik dengan capaian kinerja 104,86% dan capaian anggaran 66,88%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 33,12% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 156,77%.
- 5) Indikator Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan dengan capaian kinerja 108,04% dan capaian anggaran 98,60%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 1,40% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 109,57%.
- 6) Indikator Nilai SAKIP dengan capaian kinerja 103,47% dan capaian anggaran 74,01%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 25,99% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 139,84%.

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Tabel. 3.6
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Rencana tindak lanjut
Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	65,05%	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	1,00%	29,55%	2955%	Diusulnkan anggaran pelaksanaan pelatihan bagi pencari kerja dari masyarakat
	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	3319,05%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase realisasi Penanaman Modal	70,00%	50,12%	71,6%	Mendorong pelaku usaha untuk melakukan pelaporan, melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan fasilitasi pelaporan LKPM
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah minat investor	40%	34,37%	85,93%	Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal secara kontinyu
Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja	96,32%	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	76%	56,25%	74,01%	Dilakukan koordinasi dengan Provinsi dan Pusat terkait negara yang sudah siap menerima CPMI
			Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5,12%	8,80%	171,87%	
Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks layanan SPBE pada aspek Pelayanan Publik	104,86%	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Wajib LKPM	70%	70%	100%	
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat	80%	80%	100%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Rencana tindak lanjut
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	108,04 %	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penerbitan izin dan non izin ekonomi, pariwisata dan sosial budaya	85%	92,56%	108,89%	
				Persentase penerbitan izin dan non izin Pekerjaan Umum	85%	92,68%	109,03%	
				Persentase realisasi target retribusi IMB	100%	81,91%	81,91%	Pemrosesan IMB beralih Menjadi PBG Kewenangan DPUPR
Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	103,47%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00 %	100,00 %	100,00%	
				Nilai survey kepuasan internal	80	95,94	119,92%	
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%	90,70%	113,37%	

Tabel 3.7
Analisa Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Program/Kegiatan

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	2.955	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pengangguran yang dilatih	220 orang	- orang	0,00	Mengusulkan perubahan ketentuan penggunaan DBHCH T agar peserta pelatihan tidak hanya pekerja pabrik rokok tetapi bisa juga dari keluarga pekerja pabrik rokok dan masyarakat pencari kerja Kota Malang
	- Persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja	118,93	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	220 orang	157 orang	71,36	Mengusulkan perubahan ketentuan penggunaan DBHCH T agar peserta pelatihan tidak hanya pekerja pabrik rokok tetapi bisa juga dari keluarga pekerja pabrik rokok dan masyarakat pencari kerja Kota Malang

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	74,01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bursa kerja khusus (BKK) wilayah kab/kota	32 BKK	34 BKK	106,25	
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta Pembinaan Bursa Kerja Khusus	50 orang	50 orang	100,00	
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kab/kota	- lowongan	96 lowongan	0,00	
			Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah perusahaan peserta Job Market Fair	- perusahaan	- perusahaan	0,00	Berkordinasi dengan Diskominfo untuk pembuatan aplikasi Job Fair Active
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	171,88	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	65%	22,73%	34,97	Melakukan pembinaan, pendampingan dan pemantauan terhadap perusahaan di Kota Malang
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00	
				Jumlah dokumen usulan UMK	1 dokumen	1 dokumen	100,00	
				Jumlah peserta pembinaan tentang pemahaman dan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial	50 orang	50 orang	100,00	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil LKS Tripartit	6 dokumen	6 dokumen	100,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi penanaman modal	71,50	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal	1 dokumen	1 dokumen	100,00	
			Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Ranperda / Ranperwal yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100,00	
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha	16 pelaku usaha	16 pelaku usaha	100,00	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah minat investor	85,93	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	- kali	- kali	0,00	Menyiapkan keikutsertaan pameran investasi tahunan mendatang
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Keikutsertaan dalam gelar pameran investasi	- kali	- kali	0,00	Menyiapkan keikutsertaan pameran investasi tahunan mendatang
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan ijin dan non ijin pekerjaan umum	109,04	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan	Jumlah layanan perizinan dan nonperizinan pekerjaan umum sesuai standar	5.00 Izin	10.10 Izin	202,14	

PROGRA M	INDIKA TOR KINERJ A	CAPA IAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPA IAN (%)	RENCA NA TINDAK LANJUT
			Daerah Kabupaten/ Kota					
	Persentase Penerbitan izin dan non izin Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	108,8 9		Jumlah layanan perizinan dan nonperizinan Ekonomi, pariwisata dan sosial budaya sesuai standar	5.00 Izin 0	6.863 Izin	137,2 6	
	Persentase realisasi target retribusi IMB	81,91		Persentase IMB yang terbit	70 %	83,57 %	119,3 9	
				Persentase pengaduan yang diselesaikan	100 %	100 %	100,0 0	
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Perizinan nonperizinan pekerjaan umum yang diterbitkan	5.00 Izin 0	10.10 Izin 7	202,1 4	
				Jumlah perizinan dan Non Perizinan Ekparsosbud yang diterbitkan	5.00 Izin 0	6.863 Izin	137,2 6	
PROGRA M PENGEND ALIAN PELAKSA NAAN PENANA MAN MODAL	Persentase ketaatan pelaku usaha wajib LKPM	100,0 0	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	23 perusa haan	59 perusa haan	256,5 2	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Profil hasil pemantauan LKPM	25 proyek	25 proyek	100,0 0	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah peserta bimbingan teknis/sosialisasi	216 orang	146 orang	67,59	Mengusulkan agar peruntukan anggaran DAK supaya menyesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah sehingga kegiatan dapat direalisasikan sesuai target
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penanaman modal	30 kali	30 kali	100,00	
				Profil hasil Pengawasan dan BAP	290 proyek	48 proyek	16,55	Mengusulkan agar peruntukan anggaran DAK supaya menyesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah sehingga kegiatan dapat direalisasikan sesuai target
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat	100,00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang tersedia	70 %	70 %	100,00	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fitur	7 fitur	7 fitur	100,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	100 %	100,00	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja/RKT	1 dokumen	1 dokumen	100,00	
				Jumlah dokumen Renstra	1 dokumen	1 dokumen	100,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja dan ikhtisar realisasi	10 dokumen	10 dokumen	100,00	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen standar pelayanan	2 dokumen	2 dokumen	100,00	
				Jumlah profil perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00	
				Jumlah sertifikasi	1 sertifikasi	1 sertifikasi	100,00	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	80 %	100 %	125,00	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	70 orang	70 orang	100,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	5 laporan	5 laporan	100,00	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
			Akhir Tahun SKPD					
	Nilai Survey Kepuasan Internal	113,38	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	80 %	75 %	93,75	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus	70 stel	62 stel	88,57	Penyesuaian anggaran tahun berikutnya sesuai dengan Perwal Nomor 3 tahun 2016
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	98 orang	98 orang	100,00	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	80 %	80 %	100,00	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 jenis	10 jenis	100,00	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor	66 jenis	66 jenis	100,00	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	2 jenis	100,00	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	240 eks	240 eks	100,00	
				Jumlah perundang-undangan	4 dokumen	4 dokumen	100,00	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman	4.576 kotak	4404 kotak	96,24	Penyesuaian target kinerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan
				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	68 kali	91 kali	133,82	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bahan pustaka	6.10 berkas 0	4.367 berkas	71,59	Penyesuaian target kinerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	80 %	80 %	100,00	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100,00	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	750 m ²	750 m ²	100,00	
				Luasan ruangan yang dibersihkan	560 m ²	560 m ²	100,00	
				Jumlah bahan dan alat	26 jenis	26 jenis	100,00	
	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	119,93	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	80 %	80 %	100,00	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	2 laporan	2 laporan	100,00	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	80 %	80 %	100,00	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor	5 jenis	5 jenis	100,00	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	80 %	90 %	112,50	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	40 unit	45 unit	112,50	
				Jumlah volume BBM dan pelumas	10.700 liter	10.700 liter	100,00	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen revisi DED MPP	1 dokumen	1 dokumen	100,00	
				Luasan gedung kantor yang dipelihara	50 m2	50 m2	100,00	
				Rehabilitasi MPP	1 paket	1 paket	100,00	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	6 jenis	6 jenis	100,00	

- a. Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal.

Indikator 1 : Rasio daya serap tenaga kerja, dengan target 67 baru terealisasi sebesar 43,58 dengan capaian sebesar 65,05%. Indikator ini ditunjang oleh program Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator 2 : Persentase peningkatan nilai investasi daerah, dengan target 3,80% telah terealisasi sebesar 126,12% dengan capaian sebesar 3319,05%. Indikator ini dapat terlaksana melalui program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Program Promosi Penanaman Modal.

Sasaran 2 : Meningkatkan penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif.

Indikator 1 : Rasio Penduduk yang bekerja, dengan target 93,80% telah berhasil terealisasi sebesar 90,35% dengan capaian sebesar 96,32%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Hubungan Industrial.

Sasaran 3 : Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Indikator 1 : Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik, dengan target 3,5 telah berhasil terealisasi sebesar 3,67 dengan capaian sebesar 104,86%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Sasaran 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.

Indikator 1 : Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan, dengan target 88,8 telah berhasil terealisasi sebesar 95,94 dengan capaian sebesar 108,04%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Program Pelayanan Penanaman Modal.

Sasaran 5 : Meningkatkan kinerja pelayanan perangkat daerah.

Indikator 1 : Nilai SAKIP, dengan target 81,78 telah berhasil terealisasi sebesar 84,60 dengan capaian sebesar 103,47%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

B. REALISASI ANGGARAN.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 75,40% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.8
Realisasi Anggaran
Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1.	Sasaran 1 :	834.695.500	636.841.400	76,30
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal			
1.1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	700.000.000	503.145.900	71,88
1.1.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	700.000.000	503.145.900	71,88
1.1.1.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	700.000.000	503.145.900	71,88
1.2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	134.695.500	133.695.500	99,26
1.1.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	134.695.500	133.695.500	99,26
1.1.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	106.420.000	106.420.000	100,00
1.1.1.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	28.275.500	27.275.500	96,46
1.3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-	0,00
1.1.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00
1.1.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00
2.	Sasaran 2 :	382.874.900	373.326.000	97,51
	Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif			

No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
2.1	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	32.099.900	31.539.900	98,26
2.1.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	32.099.900	31.539.900	98,26
2.1.1.1	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	32.099.900	31.539.900	98,26
2.1.2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-	0,00
2.1.2.1	Job Fair/Bursa Kerja	-	-	0,00
2.2	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	350.775.000	341.786.100	97,44
2.2.1	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	350.775.000	341.786.100	97,44
2.2.1.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	279.024.900	271.636.000	97,35
2.2.1.2	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	71.750.100	70.150.100	97,77
3.	Sasaran 3 : Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	647.782.624	433.262.104	66,88
3.1	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	468.312.900	260.620.856	55,65
3.1.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	468.312.900	260.620.856	55,65
3.1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50.820.000	19.378.656	38,13
3.1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	227.262.000	147.237.800	64,79
3.1.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	190.230.900	94.004.400	49,42
3.2	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	179.469.724	172.641.248	96,20
3.2.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	179.469.724	172.641.248	96,20

No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
3.2.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	179.469.724	172.641.248	96,20
4.	Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perijinan	936.365.952	923.292.476	98,60
4.1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	936.365.952	923.292.476	98,60
4.1.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	936.365.952	923.292.476	98,60
4.2	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	936.365.952	923.292.476	98,60
5.	Sasaran 5 : Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18.205.893.024	13.473.330.183	74,01
5.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.205.893.024	13.473.330.183	74,01
5.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	273.232.400	266.839.900	97,66
5.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	122.198.900	117.698.900	96,32
5.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.500.000	6.500.000	100,00
5.1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144.533.500	142.641.000	98,69
5.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.876.780.649	9.443.350.968	68,05
5.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.807.729.849	9.374.383.868	67,89
5.1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	69.050.800	68.967.100	99,88
5.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.227.100	1.827.100	82,04
5.1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.227.100	1.827.100	82,04
5.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	220.830.000	220.502.820	99,85
5.1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	27.940.000	27.612.820	98,83
5.1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	192.890.000	192.890.000	100,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
5.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	671.574.324	664.965.642	99,02
5.1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.621.600	7.621.600	100,00
5.1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.192.077	198.001.350	99,40
5.1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	122.288.000	122.288.000	100,00
5.1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	65.178.470	64.401.200	98,81
5.1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252.604.177	247.963.492	98,16
5.1.5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.690.000	24.690.000	100,00
5.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.121.200	88.121.200	100,00
5.1.6.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.121.200	88.121.200	100,00
5.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	351.503.207	279.631.153	79,55
5.1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.679.389	105.524.097	60,41
5.1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	176.823.818	174.107.056	98,46
5.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.721.624.144	2.508.091.400	92,15
5.1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	313.203.360	298.596.000	95,34
5.1.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.337.942.500	2.168.303.000	92,74
5.1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.478.284	41.192.400	58,45
	TOTAL ANGGARAN	21.007.612.000	15.840.052.163	75,40

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana strategis dan Perjanjian Kinerja sekaligus sebagai gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang memiliki kategori pencapaian “Sangat Berhasil” dengan rata-rata pencapaian sebesar 632,80%, dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja program dan sasarannya. Sedangkan hasil capaian kinerja keuangan pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 75,40%.

Untuk menindaklanjuti berbagai realisasi capaian dalam tahun 2021 dan dalam upaya untuk segera mungkin dapat mengeliminasi permasalahan yang dihadapi maka diperlukan konsistensi dan komitmen seluruh aparatur dan unsur masyarakat dalam upaya peningkatan pendayagunaan sumberdaya secara optimal sesuai dengan fungsi dan manfaatnya agar memperoleh capaian kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Dalam hal perencanaan anggaran diupayakan untuk lebih optimal dan berbasis kinerja. Disamping itu, perlu adanya inovasi langkah-langkah kebijakan yang ditempuh untuk mendukung pencapaian sasaran terwujudnya pelayanan Ketenagakerjaan, Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang adil, terukur, berkualitas dan akuntabel. Langkah kebijakan selanjutnya yang perlu diprioritaskan adalah meningkatkan penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan melakukan koordinasi dengan instansi baik tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi

untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang lebih kompeten agar dapat terserap di dunia kerja sehingga dapat meningkatkan daya serap tenaga kerja di sektor formal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Tujuan

Penetapan tujuan sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan tujuan tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi. Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi kedua yaitu Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan, Misi Ketiga Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat rentan dan Gender, serta pada misi Keempat adalah Memastikan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel. Dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang mengacu pada Visi, Misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Malang untuk periode 2018-2023 sebagai berikut :

Misi 2 Kota Malang :

- Tujuan : Terwujudnya Produktifitas dan Daya Saing Daerah yang merata dan berkelanjutan
- Indikator : Pertumbuhan Ekonomi
- Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif
- Indikator : Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif

Misi 3 Kota Malang :

- Tujuan : Terwujudnya Kesejahteraan dan Kerukunan Sosial yang berpihak Masyarakat Rentan dan Gender.
- Indikator : Persentase Penurunan PMKS
- Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial

Misi 4 Kota Malang :

- Tujuan : Terwujudnya Kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, professional dan akuntabel
- Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi
- Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas system kelembagaan yang efektif
- Indikator : Nilai SAKIP, Opini BPK, Maturitas SPIP dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
- Sasaran 4 : Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi
- Indikator : Indeks kematangan SPBE

Dari uraian tersebut diatas maka Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, menetapkan tujuan untuk kurun waktu 2018-2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel”

Sedangkan untuk Indikator Tujuan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang adalah :

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
2. Predikat WBK

b. Sasaran

Telah diuraikan tujuan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan perlu disusun sasaran dan indikatornya agar dapat diketahui tingkat capaiannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu maka setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta mengacu pada arahan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang untuk kurun waktu 2018-2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang kompeten dan Nilai Penanaman Modal
Indikator :
 - Rasio Daya serap tenaga kerja
 - Persentase peningkatan nilai investasi daerah.
2. Meningkatnya Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Indikator :
 - Rasio penduduk yang bekerja.
3. Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator :
 - Indeks Layanan SPBE pada aspek Pelayanan Publik.
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Indikator :
 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perizinan dan Non Perizinan.
5. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - Nilai SAKIP.

Selanjutnya Tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

G.IV-4

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perijinan dan non perijinan yang akuntabel		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		65,94						72	
			Predikat WBK								75	
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	38,73	63,91	63,91	65	67	70	73	73		
		Persentase peningkatan nilai investasi daerah			3,6 %	3,7 %	3,8 %	3,9 %	4,0 %	4,0 %		
	Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja		93,21%	93,21%	93,50%	93,80%	94,10%	94,40%	94,40%		
	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik			2,5	3	3,5	3,8	4,5	4,5		
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan		87	85	88,5	88,8	89	89	89		
	Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	79,66	81,65	81,65	81,75	81,76	81,80	81,85	81,85		



PEMERINTAH KOTA MALANG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. H. SUTIAJI

Jabatan : WALIKOTA MALANG

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

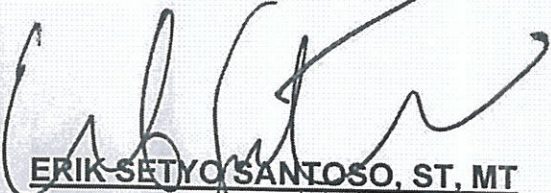
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 21 Oktober 2021

WALIKOTA MALANG, {

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Drs. H. SUTIAJI

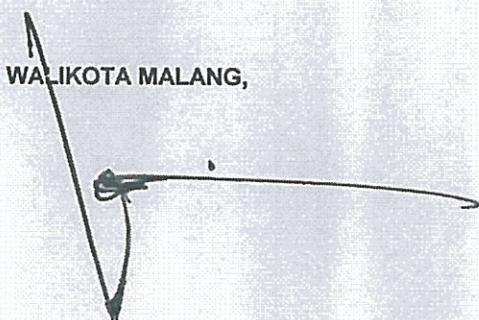

ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19730425 199803 1 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang kompeten dan Nilai Penanaman Modal	1. - Rasio Daya Serap Tenaga Kerja - Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	67 3,8 %
2.	Meningkatnya Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	2. Rasio penduduk yang bekerja.	93,80 %
3.	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3. Indeks Layanan SPBE pada aspek Pelayanan Publik.	3,5
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perizinan dan Non Perizinan.	88,8
5.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	5. Nilai SAKIP.	81,76

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 18.205.893.024,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Transfer Umum (DAU)
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rp 700.000.000,00	DBH CHT
3. Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 32.099.900,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) DBH CHT
4. Program Hubungan Industrial	Rp 350.775.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 134.695.500,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6. Program Pelayanan Penanamn Modal	Rp 936.365.952,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanamn Modal	Rp 468.312.900,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Khusus (DAK)
8. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 179.469.724,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)


WALIKOTA MALANG,



Drs. H. SUTIAJI

Malang, 21 Oktober 2021

Pit. KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19730426 199803 1 004

**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG
TAHUN 2021**

PENGUKURAN KINERJA

No.	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target Tahun 2021 (4)	Kinerja Tahun 2021							
				Tribulan I (5)		Tribulan II (6)		Tribulan III (7)		Tribulan IV (8)	
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya scrap tenaga kerja	67	64,36	96,06	64,36	96,06	64,36	96,06	43,58	65,05
		Persentase peningkatan nilai investasi daerah	3,80%	-76,17%	-2004,47	64,01%	1684,47	64,01%	1684,47	126,12%	3319,05
2.	Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja	93,80%	90,39%	96,36	90,39%	96,36	90,39%	96,36	90,35%	96,32
3.	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks kematangan SPBE pada aspek Pelayanan Publik	3,50	2,67	76,29	2,67	76,29	2,67	76,29	3,67	104,86
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	88,80	-	0,00	97,77	110,10	97,77	110,10	95,94	108,04
5.	Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	81,75	0,00	0,00	84,60	103,49	84,60	103,49	84,60	103,49

Malang, Februari 2022
Pt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

SITI MAHMUDAH, SE., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690324 199603 2 002